



Analisis Peranan Dan Tugas Staff Komisi C Dalam Mendukung Kinerja Dewan Komisi C DPRD Provinsi Sumatera Utara

Friska Fauziah Umardhi¹, Muhammad Ikhsan Harahap²

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Manajemen, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email : friskafauziah04@gmail.com, m.ikhsan.Harahap@uinsu.ac.id

***Abstract** Every student at the university must complete an internship, especially at the Islamic State University of North Sumatra. Every student must have practical work experience to be able to start working after college. Internships are a good way to align theoretical knowledge with the real world of work because basically the theoretic knowledge learned in the classroom is not necessarily the same as what is done in the field. Working practices provide a great opportunity for students to interact directly with the world of business or work. Problems can arise from the failure to strike a balance between something intended and a situation that corresponds to the facts, which leads to the question "why" or "what's the reason for this". In addition, problems can emerge as a result of doubts or invalid information about an object in depth. That's the purpose of this research. This research is carried out through a qualitative approach. The research will be conducted from January 16th to February 16th at the People's Representative Council of the North Sumatra Provincial Region (Dprd Provsu), located at Imam Bonjol No.5, Petisah Central, Medan Petisha District, Medan City, North Sumatera. The research found that the DPRD C Commission of North Sumatra Province is responsible for overseeing the budget, development programmes, public policies, local financial management, and organizational performance. Therefore, the evaluation of the implementation of core tasks and functions of the Commission C should cover several important aspects, such as transparency and accountability, the effectiveness of oversight and budget management, impact on economic growth, and so on.*

Keywords : Analysis, Role, Komisi C, DPRD

Abstrak Magang adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap Mahasiswa diseluruh perguruan tinggi, Khususnya Perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Mahasiswa harus menyelesaikan Magang yang telah menjadi syarat dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Untuk dapat terjun langsung ke dunia kerja setelah kuliah, maka setiap mahasiswa harus memiliki pengalaman, guna meghadapi dunia kerja sesuai bidang yang digeluti. Oleh sebab itu, Magang sangat tepat dilaksanakan sehingga nantinya akan memberikan keselarasan antara ilmu teori dan praktek karena pada dasarnya ilmu teori yang di dapat dari bangku perkuliahan belum tentu sama dengan kerja praktek di lapangan. Kerja Praktek adalah wadah yang baik bagi mahasiswa untuk berinteraksi secara langsung dengan dunia industri atau dunia kerja. Tujuan penelitian ini yaitu karena adanya masalah muncul tidak tercapainya keseimbangan antara sesuatu yang dituju dengan keadaan yang sesuai fakta sehingga menjadi tolak ukur munculnya permasalahan dengan timbulnya pertanyaan “mengapa demikian” ataupun “apa sebabnya terjadi demikian”. Selain itu, masalah dapat timbul akibat adanya keraguan ataupun informasi yang tidak valid terhadap suatu objek secara mendalam. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Tempat dan waktu penelitian yaitu di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Dprd Provsu) yang beralamat di Jl. Imam bonjol No.5,petisah tengah,kec. Medan petisah kota medan sumatra utara, dari tanggal 16 januari s/d tanggal 16 february. Kesimpulan dari penelitian ini Observasi pada Komisi C DPRD Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa tugas pokok mereka meliputi pengawasan anggaran, program pembangunan, kebijakan publik, pengelolaan keuangan daerah, dan kinerja organisasi. Oleh karena itu, evaluasi implementasi tugas pokok dan fungsi Komisi C perlu mencakup beberapa aspek penting, termasuk transparansi dan akuntabilitas, efektivitas pengawasan dan pengelolaan anggaran, dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, partisipasi masyarakat, serta keterhubungan dengan rencana pembangunan daerah.

Kata kunci : Analisis, peran, Komisi C, DPRD

PENDAHULUAN

Magang adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap Mahasiswa diseluruh perguruan tinggi, Khususnya Perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Mahasiswa harus menyelesaikan Magang yang telah menjadi syarat dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Untuk dapat terjun langsung ke dunia kerja setelah kuliah, maka setiap mahasiswa harus memiliki pengalaman, guna meghadapi dunia kerja sesuai bidang yang

Received : 17 September 2023 , Revised : 23 Oktober 2023 , Accepted : 15 November 2023

* Friska Fauziah Umardhi, friskafauziah04@gmail.com

digeluti. Oleh sebab itu, Magang sangat tepat dilaksanakan sehingga nantinya akan memberikan keselarasan antara ilmu teori dan praktek karena pada dasarnya ilmu teori yang di dapat dari bangku perkuliahan belum tentu sama dengan kerja praktek di lapangan. Kerja Praktek adalah wadah yang baik bagi mahasiswa untuk berinteraksi secara langsung dengan dunia industri atau dunia kerja.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (disingkat DPRD Provsu) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah, DPRD Provsu berlokasi di Jl. Imam Bonjol No. 5, Petisah Tengah, Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Posisi DPRD Provsu dalam pemerintahan daerah memegang tiga peranan penting yaitu : legislasi, anggaran dan pengawasan. Fungsi legislasi yaitu merancang kebijakan – kebijakan serta regulasi yang mendukung terciptanya pelayanan public yang baik dan standar. Fungsi anggaran atau budgeting adalah memastikan bahwa anggaran dikelola dengan benar, tepat dan efisien baik jumlah maupun waktunya. Sementara, fungsi Pengawasann yaitu memantau dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan daerah dan penggunaan anggaran. Namun, berdasarkan pasal 292 ayat 2 dan pasal 343, UU 27/2009 menjelaskan bahwa DPRD tidak hanya melaksanakan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan tetapi juga melakukan fungsi representasi.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah sebuah badan legislatif di tingkat lokal yang memiliki peran krusial dalam mengelola pemerintahan di daerah (Ayu & Nurjaman, 2022). Melalui perwakilan dari partai politik, anggota DPRD bertindak sebagai suara masyarakat dalam mempromosikan perkembangan demokrasi serta menyelenggarakan pemerintahan yang efisien dan efektif di wilayah mereka.(Mahadiansar et al., 2020)

Peranan DPRD Provsu yaitu sebagai perwakilan dari rakyat dalam unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang bertugas membuat peraturan daerah dan dituntut memiliki sensitivitas dan kapabilitas yang memadai dalam menyerap, merangkung dan menidaklanjuti aspirasi rakyat, melaksanakan tanggung jawab dan menerapkan tata kelola yang baik khususnya dalam meningkatkan kapasitas DPRD dalam mewujudkan pelayanan public yang berkualitas untuk kesejahteraan rakyat di Sumatera Utara.

Sebagaimana yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor. 32 Tahun 2004, bahwa pemerintahan daerah merupakan instrument pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, bahwa DPRD dan Kepala Daerah mempunyai kedudukan yang sama dan bersifat kemitraan yang bertanggung jawab dalam memastikan proses pemerintahan dan pembangunan berjalan dengan baik.

Adapun bidang dari Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD Provsu) adalah Bidang Keuangan, meliputi: keuangan daerah, pendapatan daerah, perpajakan, retribusi, perbankan, badan usaha milik negara, perusahaan patungan dan penanaman modal dan badan layanan umum daerah.

Sementara tugas dan fungsi yang terdapat dalam Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (DPRD Provsu) sebagai berikut :

1. Fungsi penunjang urusan di bidang keuangan (Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah).
2. Urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan ptsp (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu).
3. Urusan pemerintahan bidang kesehatan : Dinas kesehatan : a. Rumah sakit. b. Urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).
4. Urusan pemerintahan bidang sosial (Dinas Sosial).
5. Sekretariat Daerah : a. Bagian Administrasi Perekonomian. b. Bagian Umum. c. Bagian Administrasi Kesra.
6. BUMD (perusahaan daerah, perusahaan patungan dan badan usaha).

Oleh karena itu, untuk melihat bagaimana implementasi tugas pokok dan fungsi dari Komisi C DPRD Sumatera Utara dalam aspek mengelola dan mengatur keuangan dan pendapatan daerah di Sumatera Utara. Maka, Penulis berencana melakukan sebuah penelitian yang berjudul: “Analisis Peranan Dan Tugas staff Komisi C Dalam Mendukung Kinerja Dewan Komisi C Dprd Provinsi Sumatera Utara”

KAJIAN TEORI

a. Peran

Peran merujuk pada serangkaian perilaku, tindakan, atau fungsi yang diharapkan dari individu atau entitas dalam suatu konteks atau situasi tertentu. Lebih lanjut, peran mencerminkan tanggung jawab dan ekspektasi yang melekat pada individu, kelompok, atau entitas tertentu dalam lingkungan sosial, organisasi, atau sistem tertentu.

b. Tugas

Tugas merujuk pada kewajiban utama atau tanggung jawab inti yang harus dilakukan oleh suatu individu, unit, atau organisasi dalam konteks pekerjaan atau lingkup tugas yang diberikan. Tugas pokok sering kali merupakan aktivitas atau peran yang merupakan fokus

utama dari pekerjaan atau fungsi tertentu. Hal ini dapat mencakup serangkaian kegiatan yang harus diselesaikan secara teratur atau khusus guna mencapai tujuan atau hasil yang telah ditetapkan. Tugas pokok biasanya ditetapkan berdasarkan pada misi, visi, atau tujuan organisasi, dan memberikan pedoman mengenai apa yang diharapkan dari individu atau unit tersebut dalam menjalankan fungsinya.

c. Komisi C

Kinerja merujuk pada kapabilitas individu atau entitas, seperti organisasi atau perusahaan, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja sering dilakukan dengan mempertimbangkan sejauh mana individu atau entitas tersebut berhasil memenuhi target, standar, atau hasil yang diinginkan dalam periode waktu tertentu. Dalam hal ini, kinerja sering dihubungkan dengan prestasi keuangan, efisiensi operasional, kepuasan pelanggan, inovasi, dan pertumbuhan pasar dalam lingkungan organisasi atau bisnis. Dalam konteks individu, kinerja dinilai berdasarkan pencapaian target kerja, efektivitas dalam menyelesaikan tugas, kemampuan bekerja dalam tim, dan kriteria lain yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau lingkungan kerja. Baik penilaian kualitatif maupun kuantitatif digunakan untuk mengevaluasi kinerja, dengan menggunakan indikator atau metrik yang terukur, seperti produktivitas, profitabilitas, kepuasan pelanggan, atau kualitas produk dan layanan. Monitoring dan evaluasi kinerja sangat penting untuk memastikan bahwa tujuan dan target yang telah ditetapkan dapat tercapai, serta untuk mengidentifikasi area di mana perbaikan atau pengembangan lebih lanjut diperlukan. Dengan demikian, manajemen kinerja memainkan peran kunci dalam mengembangkan strategi organisasi, mengelola sumber daya manusia, dan meningkatkan kinerja keseluruhan.

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Creswell dikutip Eddles-Hirsch (2015) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian yang tertarik untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengalaman sebuah fenomena individu dalam dunia sehari-hari. Pendekatan ini melibatkan deskripsi sejumlah variabel yang terkait dengan masalah dan unit penelitian yang memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap fenomena yang sedang diuji..

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis melakukan pelaksanaan kerja praktek (magang) di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Dprd Provsu) yang beralamat di Jl. Imam bonjol No.5, petisah tengah, kec. Medan petisah kota medan sumatra utara Selama proses magang,

penulis ditempatkan di Bagian Komisi C selama kurun waktu 1 bulan yaitu dari tanggal 16 januari s/d tanggal 16 febuari Jam kerja dimulai dari Pukul 08.00 WIB –17.00 WIB dan jam istirahat dimulai dari Pukul 12.00 WIB – 14.00WIB.

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

A Deskripsi Kegiatan Magang

Adapun kegiatan magang yang dilakukan selama 1 bulan lamanya dari tanggal 16 januari-16 febuari 2023 adalah sebagai berikut :

- 1) Menyusun dan mengarsip berkas
- 2) Memfotocopy nota/surat dinas
- 3) Meminta nomor surat tugas ke tata usaha
- 4) Menulis surat masuk dan surat keluar di buku agenda surat
- 5) Mensortir surat tugas dan nota dinas
- 6) ,emgagendakan surat keluar tentang surat penugasan di buku agenda surat keluar
- 7) Mengikuti rapat komisi c ditanggal 24 januari 2023
- 8) Mengikuti rapat paripurna ditanggal 25 januari 2023
- 9) Mengetik laporan kunjungan pribadi di Ms. Word
- 10) Senam bersama staff Dprd Provsu
- 11) Rekapitulasi reses di Ms. Excel

B Fenomena

Terdapat beberapa fenomena yang ada di komisi c dprd provsu, yaitu:

- 1) Pada awal magang, penulis harus beradaptasi langsung dengan dunia kerja yaitu penulis memiliki rasa kekhawatiran salah satunya adalah melakukan akitvitas yang menjadi tanggung jawab penulis.
- 2) Saya menemukan bahwa proses kegiatan kerja kurang efektif yang mana untuk penomoran surat pada setiap komisi harusla lewat TU.
- 3) Saya menemukan pada dprd provsu kurang memanfaatkan teknologi dalam proses kegiatan administrasinya, yang mana jika pihak dprd provsu memanfaatkan teknologi maka proses kegiatan kerja akan lebih efektif dan juga efisiensi.
- 4) Saya menemukan bahwa staff komisi memiliki peranan penting dalam mendukung kinerja kerja para dewan. Yang mana staff mendukung segala administrasi.

A. Pembahasan dan Analisis

Peran Staff Komisi C

Staff Komisi C DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) memainkan peran yang sangat penting dalam mendukung kinerja anggota Komisi C DPRD. Komisi C DPRD umumnya fokus pada bidang-bidang tertentu seperti pembangunan, infrastruktur, transportasi, lingkungan, energi, dan sumber daya mineral. Dalam konteks ini, peran staff Komisi C DPRD dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pendukung Administrasi

Staff Komisi C DPRD bertanggung jawab untuk menangani administrasi sehari-hari komisi. Ini termasuk penyusunan jadwal rapat, menyusun agenda, dan mencatat serta menyebarkan hasil rapat kepada anggota dan pemangku kepentingan terkait.

2. Penyedia Informasi

Mereka membantu anggota Komisi C dengan menyediakan informasi terkait isu-isu terkini yang relevan dengan bidang-bidang yang menjadi fokus komisi tersebut. Informasi ini bisa berupa laporan terbaru, data statistik, hasil penelitian, atau masukan dari masyarakat.

3. Penelitian dan Analisis

Staff Komisi C DPRD melakukan penelitian mendalam tentang berbagai isu yang dibahas di komisi tersebut. Mereka menganalisis implikasi kebijakan, efek sosial, ekonomi, dan lingkungan dari keputusan yang akan diambil, serta memberikan informasi ini kepada anggota komisi untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

4. Hubungan Masyarakat dan Stakeholder

Staff Komisi C DPRD memfasilitasi komunikasi antara anggota komisi dan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat umum, organisasi non-pemerintah, lembaga pemerintah, dan sektor swasta. Mereka juga membantu memfasilitasi pertemuan antara anggota komisi dengan masyarakat untuk mendapatkan masukan dan umpan balik terkait kebijakan yang sedang dibahas.

5. Riset Kebijakan

Staff Komisi C DPRD terlibat dalam penelitian kebijakan yang mendalam, termasuk menganalisis kebijakan yang sudah ada, mengevaluasi dampaknya, dan memberikan rekomendasi perbaikan atau penyempurnaan kebijakan yang sudah berjalan.

6. Pemantauan dan Evaluasi

Staff Komisi C DPRD membantu dalam memantau implementasi kebijakan yang sudah disetujui oleh komisi. Mereka juga terlibat dalam evaluasi kinerja program dan proyek yang terkait dengan bidang-bidang yang menjadi fokus komisi, serta menyusun laporan evaluasi untuk anggota komisi.

Dengan menjalankan peran-peran ini dengan baik, staff Komisi C DPRD dapat secara signifikan mendukung kinerja anggota Komisi C DPRD dalam menjalankan tugas-tugas legislatif dan pengawasan di bidang-bidang yang menjadi fokus komisi tersebut. Dengan begitu, anggota komisi dapat mengambil keputusan yang lebih informasional dan berdasarkan bukti yang kuat.

Tugas Staff Komisi C

Perlu diketahui staff Komisi C bertanggung jawab penuh atas tercapainya keberhasilan komisi c. Adapun tugas dan tanggung jawab staff komisi c dprd provsu adalah sebagai berikut:

1. Menyusun perencanaan dana anggaran kunjungan kerja

Tugas ini adalah staff komisi c harusla membuat perencanaan mengenai dana anggaran kunjungan kerja yang nantinya akan ditinjau kembali oleh pihak terkait. Pada saat melaksanakan kunjungan kerja, biaya yang diperlukan awalnya ditanggung oleh staf atau anggota dewan yang berpartisipasi dalam kunjungan tersebut. Hal ini disesuaikan dengan fakta bahwa tidak semua anggota dewan atau anggota Komisi C ikut serta dalam kunjungan, sehingga pengeluaran tergantung pada setiap individu yang terlibat, dan bukan pada jumlah total staf di Komisi C. Pengeluaran tersebut tidak melampaui batas yang telah ditetapkan dalam anggaran tunai yang telah disusun sebelumnya atau yang ditetapkan oleh Peraturan Gubernur. Setelah kunjungan dinas selesai, biaya yang sebelumnya dikeluarkan oleh masing-masing individu akan ditanggung oleh Sekretariat DPRD Prov. SU, yang berarti biaya yang telah dikeluarkan awalnya akan dikembalikan dengan mengikuti prosedur dan persyaratan yang diperlukan (Kamal et al., 2023).

2. Menyusun surat perizinan perjalanan dinas

Tugas ini adalah staff komisi c harusla membuat surat perizinan berupa nota dinas, Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

3. Menyusun agenda kegiatan komisi c dprd provsu

Tugas ini adalah staff komisi c harusla membuat seluruh agenda/ jadwal-jadwal dean baik itu agendan kunker ataupun perjalanan dinas.

4. Menyusun dan mengadakan rapat komisi yang diadakan secara berkala

Tugas ini adalah staff komisi c harusla menyusun dan mengadakan rapat dewan yang diselenggarakan di ruang rapat yang berada di komisi c dprd provsu.

Jadi dapat di ketahui bahwa staff adalah salah satu pendukung penting dalam mendukung kinerja dewan komisi c dprd provsu. Tanpa adanya staff yang mendukung dewan dprd maka keberhasilan program kerja pada dewan dprd akan mengalami kendala. Hal ini

dikarenakan peran dan tanggung jawab staff dalam menangani segala urusan yang berhubungan dengan administrasi membuat meningkatnya kinerja dewan dprd pada setiap komisi yang ada.

Staf di DPRD memainkan peran yang krusial dalam mendukung aktivitas dan tugas-tugas dewan serta anggota DPRD. Tanggung jawab mereka mencakup tugas-tugas administratif dan teknis yang penting untuk memastikan kelancaran operasional DPRD. Mereka turut serta dalam penyusunan laporan, perencanaan jadwal pertemuan, manajemen komunikasi internal dan eksternal, serta menyediakan informasi yang diperlukan untuk proses pengambilan keputusan. Di samping itu, staf berperan sebagai penghubung antara DPRD dan masyarakat, serta membantu mengkoordinasikan program-program yang diusulkan oleh DPRD demi kepentingan masyarakat. Sehingga, kontribusi staf DPRD memiliki dampak langsung terhadap kinerja DPRD sebagai lembaga legislatif yang mewakili kepentingan masyarakat.

Apabila staf tidak hadir di DPRD, berbagai aspek operasional dan administratif dari dewan dapat terganggu. Kehadiran staf memainkan peran penting dalam menjaga kelancaran proses internal dan eksternal DPRD. Beberapa konsekuensi yang mungkin timbul akibat absennya staf di DPRD termasuk:

1. Penurunan Efisiensi Operasional

Kehilangan staf yang menangani tugas administratif dan teknis dapat menurunkan efisiensi operasional DPRD, menghambat proses penyusunan laporan, penjadwalan pertemuan, dan manajemen komunikasi yang diperlukan sehari-hari.

2. Keterbatasan Akses Informasi dan Analisis

Absennya staf dapat menyebabkan keterbatasan akses terhadap informasi dan analisis penting yang diperlukan untuk pengambilan keputusan di DPRD. Hal ini berpotensi memengaruhi kemampuan dewan dalam membuat keputusan yang berdasarkan informasi yang akurat.

3. Kesulitan dalam Koordinasi Program dan Acara

Tanpa staf, koordinasi program dan acara yang direncanakan oleh DPRD untuk kepentingan masyarakat dapat terhambat. Situasi ini dapat memengaruhi kemampuan DPRD dalam merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara efektif.

4. Penurunan Kualitas Hubungan dengan Masyarakat

Staf berperan sebagai penghubung antara DPRD dan masyarakat. Tanpa kehadiran mereka, kualitas hubungan antara DPRD dan masyarakat dapat terpengaruh, mengurangi keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam proses legislatif.

Dengan demikian, keberadaan staf yang kompeten dan terlatih di DPRD menjadi krusial dalam mendukung kelancaran tugas legislatif.

B. Rekomendasi

Berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan oleh Komisi C DPRD Provinsi Sumatera Utara guna meningkatkan kinerja dan kontribusinya terhadap pembangunan daerah:

- 1) **Peningkatan Pengawasan Anggaran** Meningkatkan mekanisme pengawasan terhadap penggunaan dana anggaran kunjungan kerja dan program-program lainnya yang menjadi tanggung jawab Komisi C, untuk memastikan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dana publik.
- 2) **Penggunaan Teknologi Informasi yang Tepat** Guna Menerapkan teknologi informasi yang tepat guna dalam pengelolaan data, pelaporan, dan pengawasan anggaran guna meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses kerja Komisi C.
- 3) **Pelatihan dan Pengembangan Karyawan** Melakukan pelatihan dan pengembangan karyawan secara rutin untuk meningkatkan kapasitas anggota Komisi C dalam menghadapi tuntutan yang kompleks dari tugas-tugas legislatif dan pengelolaan dana anggaran kunjungan kerja.
- 4) **Penyusunan Rencana Kerja yang Terukur** Menetapkan rencana kerja yang terukur dengan tujuan yang spesifik dan terukur untuk memastikan bahwa aktivitas dan anggaran yang disusun Komisi C sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Observasi pada Komisi C DPRD Provinsi Sumatera Utara menunjukkan bahwa tugas pokok mereka meliputi pengawasan anggaran, program pembangunan, kebijakan publik, pengelolaan keuangan daerah, dan kinerja organisasi. Oleh karena itu, evaluasi implementasi tugas pokok dan fungsi Komisi C perlu mencakup beberapa aspek penting, termasuk transparansi dan akuntabilitas, efektivitas pengawasan dan pengelolaan anggaran, dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, partisipasi masyarakat, serta keterhubungan dengan rencana pembangunan daerah.

Analisis yang mendalam terhadap implementasi tugas pokok dan fungsi Komisi C DPRD Provinsi Sumatera Utara terhadap pengelolaan keuangan dan pendapatan di daerah dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak kinerja Komisi C terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Hal ini penting untuk memastikan

bahwa kebijakan dan program yang dijalankan Komisi C memberikan dampak positif dan terukur bagi masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan. Dengan demikian, evaluasi tersebut dapat menjadi dasar untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Komisi C di masa depan.

2. Saran

Terdapat beberapa saran agar komisi c dapat mengoptimalkan kinerja mereka yaitu :

1. Peningkatan Pengawasan

Meningkatkan mekanisme pengawasan terhadap penggunaan dana kunjungan kerja melalui penggunaan teknologi, seperti sistem pelaporan online, yang memungkinkan publik untuk memantau penggunaan dana secara real-time.

2. Pengembangan Rencana Kerja yang Jelas

Mengembangkan rencana kerja yang jelas dan terukur untuk kunjungan kerja, termasuk penetapan tujuan spesifik dan indikator keberhasilan yang dapat diukur.

3. Komunikasi yang Efektif:

Meningkatkan komunikasi antar anggota Komisi C, baik secara internal maupun eksternal, untuk memastikan bahwa tujuan dan rencana kunjungan kerja dipahami dengan jelas oleh semua pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, N., & Nurjaman, A. (2022). Implementasi Pelaksanaan Pengawasan Pembangunan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21(1), 59–69. <https://doi.org/10.35967/njip.v21i1.287>
- Kamal, M., Sagala, A., Lubis, A. W., William, J., Ps, I. V., Estate, M., Percut, K., Tuan, S., & Serdang, K. D. (2023). Analisis Prosedur Pencairan Dana Pada Saat Kunjungan Kerja Komisi C DPRD Sumatera Utara. *Maret*, 2(1), 1–10.
- Mahadiansar, M., Ikhsan, K., Sentanu, I. G. E. P. S., & Aspariyana, A. (2020). Paradigma Pengembangan Model Pembangunan Nasional Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 17(1), 77–92. <https://doi.org/10.31113/jia.v17i1.550>
- SLEMAN, D. K. (2023). *Komisi C*. <https://dprd.slemankab.go.id/alkap-dprd/komisi/komisi-c/#:~:text=mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di,lingkup bidang tugas Komisi%3B dan>